

**IMPLEMENTASI SIDANG KELILING
OLEH PENGADILAN AGAMA REMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Perdata Islam



Oleh :

RIZKY MAHARDHIKA GISWARA
NIM. 132111015

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L.19 RT. 04 RW. IV Kramas

Hj. Brilliyen Erna Wati, SH. M.Hum

Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Rizky Mahardhika Giswara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rizky Mahardhika Giswara

NIM : 132111015

Jurusan : Ahwalus al-Syahiyyah

Judul : Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama
Rembang

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1002

Semarang, 17 Juli 2018

Pembimbing II



Hj. Brilliyen Erna Wati, S.H. M.Hum
NIP. 19631219 19903 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291.7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rizky Mahardhika Giswara
NIM : 132111015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Implementasi Pelaksanaan Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang**

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal :

31 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 31 Juli 2018

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang,

Briliyan Erna Wati, S.HI., M. Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama II



Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag.
NIP. 196910311005031002

Pembimbing II

Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum
NIP. 196312191999032001

MOTTO

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ...
(البقرة: ٢٨٢)

*“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil”.**

* Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush haf Asy syarif, Medina Al Munawwarah, h. 70-71.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan lelah kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada-Nya lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Papahku tercinta Indro Harto Kamu dan Mamahku tersayang Ismi Winarti yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Ibu Sambung Leni dan Budhe Suwarti yang juga memberikan semangat dan do'a serta tambahan finansial untuk Kakak.
3. Teman-teman AS'A 13 yang menjadi keluarga baruku.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2018

Deklator



Rizky Mahardhika Giswara
NIM. 132111015

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi Kabupaten Rembang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum seperti perkawinan, warisan, waqaf, perceraian dan ekonomi. Disini peran pengadilan untuk melakukan pengadilan keliling sebagaimana yang terdapat di Desa Bencang Kecamatan Sale yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang dibutuhkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?

2) Problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif. Data di peroleh dengan menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rembang dan masyarakat Kecamatan Sale yang melakukan sidang keliling dan sumber data sekunder adalah buku-buku terkait dengan pengadilan agama. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ingin mencatatkan urusan pernikahan maupun perceraian, namun jarak tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Rembang, pelaksanaan sidang dilakukan sebulan dua kali yang berlokasi di kantor Kecamatan Sale atau rumah warga. Proses pelaksanaan sidang keliling dilakukan sebagaimana sidang di Pengadilan Agama Rembang yaitu melalui pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pembayaran, tahap pemeriksaan sidang keliling, tahap pembuktian sidang keliling, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang. 2) Problematika implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang terkait lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Rembang tentunya memakan waktu dan kurang maksimal dalam proses tahapan sidang,

Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang keliling sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat sederhana, tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan, dana dwipa yang tidak selalu turun menjadikan pendanaan sidang keliling kurang maksimal, tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu, dan masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, malu dilihat tetangga.

Kata kunci: Implementasi, Sidang Keliling, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifa, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Perdata Islam dan Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Perdata Islam atas segala bimbingannya.
4. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Hj. Brilliyen Erna Wati, SH. M.Hum, selaku dosen

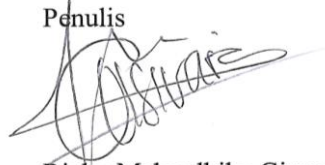
pembimbing II yang telah membantu meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis serta memberi motivasi selama sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 17 Juli 2018

Penulis



Rizky Mahardhika Giswara
NIM. 132111015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGADILAN AGAMA DAN	
 PENANGANAN PERKARA	
A. Pengadilan Agama.....	23
1. Pengertian Pengadilan Agama	23
2. Fungsi Pengadilan Agama	25
3. Tugas Pengadilan Agama.....	26
4. Tugas Hakim dalam Pengadilan Agama	27

	B. Kompetensi Pengadilan Agama Relatif dan Absolut.....	30
	C. Proses Beracara di Pengadilan Agama	37
	D. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan.....	47
BAB III	SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA REMBANG	
	A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Rembang	61
	B. Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang.....	68
	C. Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang.....	88
BAB IV	ANALISIS SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA REMBANG	
	A. Analisis Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang	89
	B. Analisis Solusi Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang	117
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	120
	B. Saran-Saran.....	121
	C. Penutup	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal-balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagi masalah sosial.² Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh pengadilan Agama.

Dalam sejarah peradilan Islam di Indonesia disebut dengan peradilan Agama. Peradilan ini telah ada di berbagai tempat di Nusantara jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada sejak abad ke-16. Hal ini dibukukan oleh Departemen Agama di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1882 dan ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya Ordonatie Stb 1882-152 tentang peradilan agama di pulau Jawa-Madura. Hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan suka rela, tetapi hingga diundangkannya

² Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta: CV.Adi Grafika, 2014, h. 6.

Undang-undang NO 7 tahun 1989 peradilan agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya.³

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama dapat digunakan untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu, disamping tetap berpedoman pada dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqih. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sodaqoh, infak, zakat serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diharapkan mampu melayani permasalahan perdata yang dialami warga sampai ke pelosok desa. Sehingga

³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003, h 1

legalitas dari hubungan perdata dan permasalahan perdata yang dialami masyarakat muslim pelosok mendapat kepastian hukum. Peradilan Agama merupakan salah satu wahana penunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga peranan Pengadilan Agama akan sangat menentukan efektif tidaknya wahana penunjang tersebut.⁴

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.⁵ Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menyebutkan, “Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan

⁴ Kadi, S, *Pengadaan Hakim Pengadilan Agama*, Pembimbing, No. 61 Tahun 2012. XIV., h. 16.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15, h. 10

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010 cet-14, h. 130-131

dalam bentuk Sidang. Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Rembang, yang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum seperti perkawinan, warisan, waqaf, perceraian dan ekonomi karena keterbatasan akses daerah yang ditempatinya, seperti yang terjadi pada Desa Bencang, Tahunan, Bitingan dan Ngajaran Kecamatan Sale yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang dimana jarak ke empat Desa tersebut kurang lebih 60 KM dari pusat kota Rembang dan masih banyak jalan yang tidak betonisasi atau aspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkawinan, kewarisan, waqaf, perceraian dan lainnya sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum.

Disini peran pengadilan untuk melakukan pengadilan keliling sebagaimana yang terdapat di Desa Bencang Kecamatan Sale yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang dibutuhkan. Namun penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang begitu pula dalam penyusunan berkas perkara terjadi perbedaan dengan dirangkumnya berita acaranya lebih dari sekali sidang. Namun

setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2015 peran pengadilan agama dalam pelayanan terpadu sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan:

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan, perkara terkait lainnya oleh pengadilan negeri atau istbat nikah oleh pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan dan pencatatan kelahiran
2. Pencatatan perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau kantor urusan agama
3. Pencatatan kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.

Keluarnya Perma No 1 tahun 2015 yang hanya bertugas mengesahkan akan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat pelosok yang tidak memiliki akses ke kantor Pengadilan Agama untuk mengurus proses sidangnya, karena sidang keliling hanya mengesahkan saja, tanpa melakukan proses persidangan, proses sidang keliling yang penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang yang hanya sekali pertemuan belum tentu efektif bagi masyarakat, apalagi sidang keliling tersebut hanya mengesahkan saja, hal ini penting untuk diteliti lebih jauh pelaksanaan dari pengadilan tersebut efektif atau tidak dalam segi aplikasinya melalui penelitian yang mendalam.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul

”Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
2. Problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori tentang implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama Rembang

Sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi Pengadilan Agama Rembang dalam melaksanakan sidang keliling.

- b. Fakultas Syari'ah dan Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi satu kajian baru tentang implementasi pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang di desa-desa terpencil.

- c. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Sutriyono, (2006) yang berjudul "*Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*". Hasil penelitian menunjukkan Dalam

penerapannya di Pengadilan Agama Semarang asas sederhana, cepat dan biaya ringan masih kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini terlihat dari banyaknya hambatan dalam penyelesaian perkara. Walaupun proses penyelesaian perkara selalu berjalan mulai perkara masuk sampai perkara tersebut di putus. Hambatan tersebut datang dari instansi pengadilan agama itu sendiri maupun dari luar pengadilan agama. Kendala tersebut antara lain dari para pihak yang berperkara, jurusita, panitera, hakim maupun pengacara atau advokat.

2. Penelitian Nor Rofi'i (2015) berjudul *Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Di Kecamatan Kundur)*. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di gedung serbaguna Balai Srigading Kecamatan Kundur berjalan dengan baik dan sistematis. Dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (litigasi reguler). Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yakni di gedung serbaguna Balai Srigading Kecamatan Kundur. Untuk pendaftaran masih tetap di gedung Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Dan pelaksanaan sidang keliling telah sesuai hukum Islam dari sudut

kemaslahatan saling tolong menolong dalam kebaikan serta melindungi lima sendi kehidupan meliputi : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari hasil penelitian di atas, diharapkan akan adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang lainnya yang membahas tentang pelaksanaan sidang keliling secara khusus dan lebih terperinci mengingat dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 hanya menjelaskan sidang keliling secara umum. Terlebih khusus mengenai pelaksanaan persidangannya atau hukum acara yang harus diterapkan dalam proses pelaksanaan sidang keliling.

3. Penelitian Sofiani Hartatik (2014) berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah : Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Hasil penelitian menunjukkan dilaksanakannya sidang keliling perkara itsbat nikah adalah guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dalam akses ke pengadilan agama sehingga meringankan biaya, transportasi, dan proses, selain itu sidang keliling juga bermanfaat memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan dengan diterbitkannya akta nikah bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Adapun teknis pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah sama dengan sidang itsbat nikah pada umumnya yaitu berlaku hukum acara pengadilan agama hanya perbedaannya terletak pada lokasi sidang keliling yang dilakukan diluar pengadilan agama. Pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan

Agama Kabupaten Malang diperuntukkan bagi perkawinan setelah UndangUndang No. 1 tahun 1974 hal ini berdasar atas pertimbangan hakim yaitu bahwa perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak termasuk dalam perkawinan yang batal hukum, atas adanya pertimbangan hukum dikabulkannya itsbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan setelah UndangUndang No. 1974 dikhawatirkan semakin banyak timbul perkawinan yang tidak dicatatkan dan hal ini termasuk dalam pembangkangan terhadap undang-undang serta menyepelekan ketentuan administratif yang telah ditetapkan undang-undang.

4. Penelitian Ulfi Azizah (2013) berjudul *Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mungkid di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor : W11-A30/80.A/Ku.04.2/Sk/I/ 2012. Dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (litigasi reguler). Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Mungkid, yakni di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Untuk pendaftaran dan pengambilan putusannya

masih tetap di gedung Pengadilan Agama Mungkid. Dari hasil penelitian di atas, diharapkan akan adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang lainnya yang membahas tentang pelaksanaan sidang keliling secara khusus dan lebih terperinci. Mengingat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 hanya menjelaskan sidang keliling secara umum. Terlebih khusus mengenai pelaksanaan persidangnya atau hukum acara yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sidang keliling.

Dari penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang peran pengadilan agama dan pelaksanaan sidang keliling, namun penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada implementasi sidang keliling dan problematikanya khususnya tersebut bagi masyarakat yang tidak diteliti dalam penelitian di atas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷ Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha memotret implementasi sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 22

Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif yaitu pemanfaatan hukum secara lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dikembangkan dalam rangka ajaran *sociological jurisprudence*, yang dalam perkembangannya dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atau fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Berpijak pada keadaan kemudian, maka hukumpun kemudian dikonsepkan secara sosilogi sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.⁹ Penelitian lapangan dengan pendekatan sosio normatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang dan problematika yang dihadapi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Rembang dan tempat pelaksanaan sidang keliling yaitu di Desa Bencang, Tahunan, Bitingan dan Ngajaran Kecamatan Sale yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang

⁸ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, h. 174

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 75-76

untuk melihat dan menganalisis atas pelaksanaan dan solusi problematikanya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁰ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rembang dan masyarakat Kecamatan Sale yang melakukan sidang keliling.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹¹ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

¹⁰ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

¹¹ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.

Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan pengadilan agama.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹³

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang implementasi sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang. Pihak yang diwawancari adalah hakim pengadilan agama rembang dan masyarakat.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 132

¹³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 23

b. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁴ Peneliti menggunakan observasi *non-partisipan*, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.¹⁵ Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang implementasi sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang dan problematika yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai profil Pengadilan Agama

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989, h. 45

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 123

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 135

Rembang dan dokumen terkait pengadilan keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan, suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif. Disamping itu agar penelitian ini tidak berat sebelah maka penulis menggunakan teknik *members check*.¹⁷

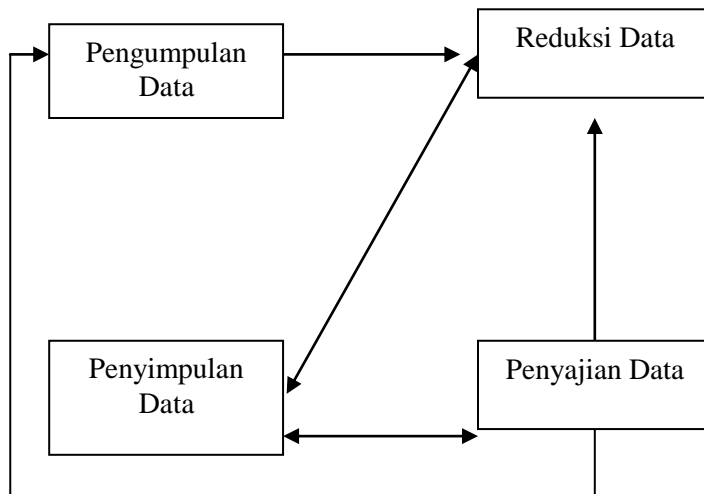
Jadi, maksud dari penggunaan pengelolaan data ini adalah peneliti mengecek beberapa data (*members check*) yang berasal selain hakim Pengadilan Agama Rembang, data juga di cek dari sumber masyarakat yang mengikuti pengadilan keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004, h. 178-179

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁸ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.¹⁹ Teknik analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan dalam skema di bawah ini.



Gambar 1.1
Siklus Proses Analisis Data

¹⁸ *Ibid*, h. 7

¹⁹ *Ibid*, h. 103

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁰ Pengumpulan data ini yang terkait masalah implementasi sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang, baik itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²¹

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara, observasi dan metode dokumenter. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai implementasi sidang keliling yang dilakukan

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h.92

²¹ *Ibid.*,

Pengadilan Agama Rembang. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²²

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²³

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka

²² *Ibid*, h. 95

²³ *Ibid*, h. 95

data itu dapat disajikan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang, dan seterusnya.

d. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi , yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

²⁴ *Ibid*, h. 99

menjadi jelas.²⁵ Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai implementasi sidang keliling pasca yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang. Dan solusi terhadap problematika yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tinjauan umum tentang Pengadilan Agama dan penanganan perkara, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama tentang Pengadilan Agama meliputi pengertian Pengadilan Agama, fungsi Pengadilan Agama, tugas Pengadilan Agama. Sub bab kedua tentang kompetensi Pengadilan Agama relatif dan absolut. Sub bab ketiga tentang proses beracara di Pengadilan Agama dan Sub bab ke

²⁵ *Ibid*, h. 99

empat tentang mekanisme pemeriksaan perkara dalam Persidangan.

- Bab III : Berisi tentang sidang keliling oleh Pengadilan Agama Rembang, meliputi: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Rembang, implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang dan problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang.
- Bab IV : Berisi tentang analisis sidang keliling oleh Pengadilan Agama Rembang meliputi analisis implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang dan analisis solusi terhadap problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang
- Bab V : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PENGADILAN AGAMA DAN PENANGANAN PERKARA

A. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan

mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.²⁶

Peradilan dalam beberapa bahasa seperti *rechtpraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁷ Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam Fiqh yang berbunyi “*qadha*” dan “*aqdliyah*”.²⁸

Pengadilan secara khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Arab disebut al-Mahkamah.²⁹

Pengadilan adalah lambang kekuasaan. Pengadilan Agama di Indonesia adalah lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan,

²⁶ Penjelasan umum atas UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994, h. 41.

²⁷ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, t.th., h. 91.

²⁸ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000, h. 15.

²⁹ Sulaikhan Lubis., et. al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 3

Pengadilan Agama telah sejak lama ada di Nusantara ini.³⁰ Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Yang mempunyai tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pancasila.³¹

2. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique ed., *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa Rochman Achwan, Jakarta: LP3ES, 1998, h. 208.

³¹ Undang-Undang. No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16.

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya: a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-

lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Tugas Pengadilan Agama

Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

4. Tugas hakim dalam Pengadilan Agama

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.³²

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dicantumkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya

³² Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, ‘Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.³³

B. Kompetensi Pengadilan Agama Relatif dan Absolut

Kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.³⁴ Menurut Charles bahwa *competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan)³⁵.

³³ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.

³⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, h. 7

³⁵ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2007, h.25

Hukum Acara di Indonesia mengenal dua bentuk kompetensi/ kekuasaan/ kewenangan, yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

1. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif yakni pembagian kekuasaan antar Pengadilan berdasarkan wilayah hukumnya. Dimana pengadilan itu sejenis dan berada dalam satu tingkat yang sama. Misalnya Pengadilan Agama Rembang dan Pengadilan Agama Pati, keduanya adalah pengadilan yang sejenis yaitu, sama-sama dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama satu tingkatan, sama-sama di tingkat pertama. Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu

kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.³⁶ Yuridiksi relatif ini penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.³⁷

Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa, “peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.³⁷

³⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 26.

³⁷ *Ibid*, h. 27

Penjelasan lebih lanjut mengenai “perkara tertentu” yakni pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari’ah.³⁸

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

³⁸ *Ibid.*, h, 83

- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h. Penceraian karena talak
- i. Gugatan penceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cult-up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya

- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.³⁹

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.⁴⁰

Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/bagan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.⁴¹

Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari

³⁹ *Ibid.*, h, 89

⁴⁰ *Ibid.*, h, 89

⁴¹ *Ibid.*, h, 90

seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.⁴²

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta beda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴³

Yang dimaksud dengan zakat adalah harta benda yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁴

Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah swt.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, h, 90

⁴³ *Ibid.*, h, 90

⁴⁴ *Ibid.*, h, 90

⁴⁵ *Ibid.*, h, 91

Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah.
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. Asuransi syari'ah.
- d. Reasuransi syari'ah.
- e. Reksa dana syari'ah.
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah.
- g. Sekuritas syari'ah.
- h. Pembiayaan syari'ah.
- i. Pegadaian syari'ah.
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.
- k. Bisnis syari'ah.⁴⁶

Apabila dalam perkara-perkara tersebut di atas, dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan Hukum Islam, maka perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum. Berkaitan dengan kewenangan absolut lembaga peradilan, apabila terjadi keberatan-keberatan dari para pihak yang berkepentingan dapat diajukan

⁴⁶ *Ibid.*, h, 92

pada setiap waktu selama dalam pemeriksaan, sepanjang yang berhubungan dengan kewenangan peradilan agama, jadi keberatannya dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan.⁴⁷

C. Proses Beracara di Pengadilan agama

Mekanisme Penerimaan Perkara Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon Penggugat/Pemohon di Pengadilan. Adapun mekanisme penerimaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Perkara

Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan pengajuan Gugatan⁴⁸ atau Permohonan⁴⁹. Dalam hal pengajuan gugatan ini dapat berupa gugatan/ permohonan secara lisan, tertulis, dan lewat Kuasa Hukum. Pada prinsipnya semua

⁴⁷ HIR Pasal 134, R.Bg Pasal 160 Jo. UU No. 19 Tahun 1964 Pasal 7 Jo. UU No. 13 Tahun 1965 Pasal 1

⁴⁸ Surat Gugatan (perkara kontentius) ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

⁴⁹ Surat Permohonan (perkara voluntair) ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Pengajuan surat permohonan ini seperti penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anak, itsbat nikah, penetapan wali adhol dsb.

gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika penggugat/pemohon tidak dapat membaca dan menulis, gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama⁵⁰. Surat gugatan/permohonan tersebut dibuat rangkap 6 (enam) atau sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan yaitu untuk penggugat/pemohon, tergugat/termohon selebihnya diberikan kepada majelis hakim dan jika hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapat identitas para pihak secara jelas meliputi nama yang dilengkapi bin/binti dan aliasnya jika punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal (bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditulis tempat tinggal yang dulu ia tinggal), serta kewarganegaraan jika perlu. Selanjutnya terdapat posita (tentang keadaan/peristiwa) untuk dijadikan dasar atau alasan dari gugatan/permohonan. Posita tersebut memuat alasan yang berdasarkan fakta dan alasan yang berdasarkan hukum. Terakhir mengenai petitum yaitu tuntutan penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005, h. 40

Dalam mengajukan gugatan perdata dapat terjadi hal-hal yang mungkin terjadi yaitu penggabungan gugatan⁵¹, perubahan gugatan⁵², dan pencabutan gugatan⁵³

Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemudian diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui meja satu, yang memiliki tugas untuk⁵⁴:

- a. Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya
- b. Menaksir panjar biaya perkara

⁵¹ Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk: pertama, perbarengan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi nikah, dan izin nikah digabung menjadi satu. kedua, penggabungan subjektif model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan satu orang lebih penggugat atau sebaliknya. Ketiga, penggabungan komulasi objektif ialah penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. (ada tiga dalam komulasi objektif yang tidak diperkenankan 1. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian, 2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantara hakimnya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya, 3. Penggabungan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai eigendom). Lihat Abdul Manan, h. 27.

⁵² Perubahan gugatan ada 4 (1), diubah sama sekali dalam artian baik posita maupun petitum, (2), diperbaiki, maksudnya suatu perbaikan terhadap gugatan berarti hal-hal tertentu dari gugatan itu bisa diperbaiki misalnya kekurangan kata, kalimat, atau kesalahan ketik, (3), dikurangi, maksudnya suatu gugatan dikurangi berarti ada bagian-bagian tertentu dari posita atau petitum gugatan yang dikurangi, dan (4), ditambah, yaitu suatu gugatan ditambah berarti bagian posita dan petitum di tambah. *Ibid*, h. 29.

⁵³ Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan diperiksa di dalam persidangan, sebelum tergugat memberikan jawaban, dan sesudah tergugat memberikan jawaban. *Ibid*, hlm. 30.

⁵⁴ Mukti Arto, *Op. Cit.*, h. 59

c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut⁵⁵, yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
 - b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
 - c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
 - d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.
2. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Tahap selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/ permohonan tersebut beserta SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut⁵⁶:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara

⁵⁵ Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) H.I.R/Pasal 90 ayat (1) UU-PA 38

⁵⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, h. 149.

- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut
- c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon
- d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

3. Tahap Pendaftaran Perkara

Selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap pada Petugas Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/ permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayar tersebut, kemudian Petugas Meja II melakukan hal-hal sebagai berikut⁵⁷:

- a. Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon.
- c. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara permohonan atau register induk perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
- d. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil

⁵⁷ *Ibid*, h. 149.

panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan melalui panitera.

4. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah “Penetapan Majelis Hakim” (PMH)⁵⁸. Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.⁵⁹ PMH dibuat dalam bentuk “penetapan” dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk:

- a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang)
- b. Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita
- c. Menyidangkan perkara

⁵⁸ Pasal 121 H.I.R. jo. Pasal 93 UU No. 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dipengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

⁵⁹ *Ibid.* Pasal 94.

5. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang⁶⁰. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera.⁶¹ Untuk menjadi panitera sidang⁶², dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut⁶³. Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan.

Apabila dikemudian hari, anggota majelis ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam BAP (Berita Acara Persidangan). Apabila Ketua Majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda

⁶⁰ Pasal 17 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman:..... sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melekuakn pekerjaan panitera.

⁶¹ Pasal 96 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama:..... Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.

⁶² Istilah panitera sidang digunakan sebagai fungsi jabatan kepaniteraan.

⁶³ Pasal 97 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pada hari lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau karena alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan PMH baru⁶⁴. Apabila panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yang lainnya untuk mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan oleh panitera pengadilan secara tertulis.

Panitera sidang yang ditunjuk, memiliki tugas:

- a. Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu Majelis Hakim dalam hal:
 - 1) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)
 - 2) Membuat penetapan sita jaminan
 - 3) Membuat BAP (Berita Acara Persidangan)⁶⁵ yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - 4) Mengetik putusan/penetapan sidang.
- c. Melaporkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:
 - 1) Penundaan sidang serta alasan-alasannya.
 - 2) Amar putusan sela (kalau ada).
 - 3) Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan

⁶⁴ Mukti Arto, *Op. Cit.*, h. 62

⁶⁵ BAP adalah akta autentik, dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. BAP ditandatangani oleh Panitera yang mengikuti sidang dan Ketua Majelis Hakim. Lihat Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 93

- 4) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara yang ditanganinya.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi⁶⁶.
6. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetapan” yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam

⁶⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, h. 152. 42

buku register tersebut. Tanggal putus dan amar putusan harus terlihat di dalam buku register, begitu juga upaya hukum dan akta cerai dalam perkara cerai talak dan cerai gugat harus tercantum dalam buku register perkara gugatan/permohonan tersebut⁶⁷.

7. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan relaas atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang

⁶⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Perss, 2009, h.70.

tercantum dalam relaas dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya⁶⁸.

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu⁶⁹:

- a. Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah⁷⁰. Dengan catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan⁷¹.
- b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati/Wali Kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di

103. ⁶⁸ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, h.

⁶⁹ Pasal 390 joncto Pasal 389 dan 122 HIR.

⁷⁰ Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah adalah mereka yang telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu.

⁷¹ Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang, Pasal 103 (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.

- c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

D. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahap berikut yakni: pertama, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; kedua, pembacaan surat gugatan/permohonan; ketiga, jawaban tegugat/ temohon; keempat, Replik (tangkisan atas jawaban) dari penggugat/Pemohon; kelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); keenam, tahap pembuktian; ketujuh, tahap kesimpulan, dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.

Pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Agama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

hadir dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu⁷²:

a. Penggugat/Pemohon tidak hadir, sedang Tergugat/Termohon hadir Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

- 1) Menyatakan gugatan/permohonan gugur, atau
- 2) Menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat/pemohon. Gugatan dinyatakan gugur apabila:
 - a) Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
 - b) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
 - c) Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal ini, penggugat/pemohon baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding.

b. Tergugat/Termohon tidak hadir, sedang Penggugat/Pemohon hadir Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

- 1) Menunda persidangan untuk memanggil tergugat/termohon sekali lagi, atau

⁷² Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, h. 163-166.\

- 2) Menjatuhkan putusan verstek, karena tergugat/termohon dinilai ghoib. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:
- a) Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
 - b) Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang syah.
 - c) Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan⁷³. Dalam hal ini hakim menasehati agar penggugat/pemohon mencabut kembali gugatannya. Jika tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat/pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (verstek).
- c. Tergugat/Ternohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban

Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang

⁷³ Pasal 125 HIR atau pasal 149 R.Bg.

bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat/pemohon⁷⁴.

Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dinilai tidak benar, maka hakim memutuskan dengan verstek biasa.

Apabila tergugat kemudian mengajukan verzet dan di dalam verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.

- d. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.
- e. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama hadir dalam persidangan, maka hakim sebelum memulai wajib berusaha mendamaikan para pihak.

2. Upaya Perdamaian

⁷⁴ HIR Pasal 125 ayat 2.

Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi syarat⁷⁵. Dan kemudian hakim (mediator) wajib melaporkan hasil dari mediasinya. Karena pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hal ini dapat di lihat dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadi menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara: mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum⁷⁶.

3. Penundaan Hari Sidang

⁷⁵ Ahmadi Hasan, *Pendayagunaan Mediasi Syariah Dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, April, 2009, h. 189.

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X, 2010, h. 239

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasi kepada kedua belah pihak di hadapan persidangan hari itu, sekaligus pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada persidangan berikutnya.

Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka ketua majelis hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang kepada pihak yang tidak hadir. Perintah tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Untuk setiap kali penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan baik mengenai hari, tanggal dan jam penundaan maupun alasan penundaannya.

4. Hak Ingkar (*wraking*) Terhadap Hakim

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Maksudnya hak untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan

alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya⁷⁷.

Dalam pasal 29 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Hal ini agar peradilan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

Apabila diketahui hakim yang akan menyidangkan terkait hubungan-hubungan sebagai mana tersebut di atas dengan pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengundurkan diri, maka Ketua Pengadilan Agama harus memerintahkan Hakim tersebut untuk mundur⁷⁸. Apabila hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan sendiri, maka perintah pengunduran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, apabila hakim yang seharusnya mengundurkan diri masih tetap melakukan pemeriksaan dan sampai pada putusan, maka perkara harus segera diperiksa dan

⁷⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 (1 dan 2).

⁷⁸ Pasal 157 KUHP. (Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2005, h. 261-262).

diputus ulang dengan susunan majelis yang berbeda, dan putusan yang telah terlanjur diucapkan menjadi batal demi hukum.

5. Perubahan dan Pencabutan Gugatan⁷⁹

Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus disampaikan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya.

Perubahan dan/atau penambahan surat gugatan sifatnya adalah menyempurnakan, menegaskan ataupun menjelaskan. Dalam perubahannya tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Kecuali jika diijinkan oleh Tergugat.

Apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum, harus dicatat dalam BAP dan dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara telah diperiksa dan

⁷⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005, h. 98-99.

tergugat telah memberi jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

6. Jawaban Tergugat

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi dapat berupa pengakuan (*vorweer*)⁸⁰. Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding⁸¹.

7. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan (replik) atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya. Kemungkinan dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan

⁸⁰ Wahyu muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, h. 64.

⁸¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000, h. 48.

gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskan dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat.

Pada persidangan (praktik) replik dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis.

8. Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat in person maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

Untuk acara jawab menjawab (replik-duplik) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

9. Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerdara). Bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni:

“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang autentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ...
(البقرة: ٢٨٢)

*“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil”.*⁸²

⁸² Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush haf Asysyarif, Medina Al Munawwarah, h. 70-71.

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas⁸³. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut⁸⁴:

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar

⁸³ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000, h. 62-63.

⁸⁴ Teguh Samodera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992, h. 32-33.

oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Dan hakim bersifat aktif yaitu, hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini Kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut⁸⁵:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

10. Kesimpulan (Konklusi) Para Pihak

Dalam tahapan ini baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan hasil

⁸⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 60.

pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

11. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3, 4 dan 5) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik di saat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari ruang sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yang menyatakan “sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan”, lalu palu diketukkan satu kali⁸⁶.

Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang

⁸⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 133.

dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Persidangan dan inilah yang nantinya akan dituangkan dalam diktum keputusan. Jika musyawarah majelis hakim tersebut sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis hakim adalah “ sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali⁸⁷.

12. Putusan atau Penetapan Hakim

Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan hakim. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Sedangkan untuk pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusan namun untuk penetapan hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

⁸⁷ *Ibid.*

Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yaitu⁸⁸, pertama yang bersifat penghukuman atau kondemnatoir, yang kedua bersifat menciptakan atau meniadakan sesuatu atau konstitutif dan ketiga bersifat menerangkan atau menjelaskan atau disebut juga dengan deklaratoir.

⁸⁸ Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007, h. 81

BAB III

SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA REMBANG

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Rembang

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Rembang

Perjalanan kehidupan sejarah pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan sering lain mengalami berbagai rekayasa dan penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Aceh utara pada akhir abad ke-13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Banten. Di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan mataram memerintah

jawa tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dipesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah indonesia.⁸⁹

Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalan perdagangan di kota-kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara yang berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat tertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan menaati putusan nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana,

⁸⁹ Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif untuk hukumnya) dan ta'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat). Bila tidak ada imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat oleh *ahlu al-hally wa al-aqdi* (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan).⁹⁰

Tauliyah dari imamkah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan *qadla al-syar'i* (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode tahkim, yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenai ajaran islam, tentulah orang-orang islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran baru tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh *ahlu al-hally wa*

⁹⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

al-aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peralihan adat, yakni *het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* atau disebut pula adat *rechtspraak*. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri.⁹¹

Pengadilan agama dimasa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “pengadilan serambi”. Keadilan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan peradilan agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai

⁹¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan “*landraad*” (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “*executoire verklaring*” (pelaksanaan putusan). Pengadilan agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁹²

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan agama Rembang berdiri sejak zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan *staatblad* tahun 1882 nomor 152 dan *sttntblad* tahun 1937 nomor 166 dan 610, dengan nama *priesterrad/rad* agama, kemudian

⁹² Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

berdasarkan javanche courant nomor 25 tahun 1948 diganti dengan nama penghulu serechten.⁹³

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang

a. Visi

Terwujudnya badan Peradilan Agama yang agung

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pengadilan agama.
- 2) Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern.
- 3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
- 5) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.⁹⁴

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang

a. Tugas Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49

⁹³ Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

⁹⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi syari'ah.⁹⁵

b. Fungsi Pengadilan Agama Rembang

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, pengadilan agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006)

⁹⁵ Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor No. 3 tahun 2006 Jo. KMA nomor KM/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/juru.⁹⁶

B. Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Rembang untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju ke kantor PA, yang nantinya juga bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling di PA Rembang adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang PA.⁹⁷

⁹⁶ Dokumentasi Pengadilan Agama Rembang, di kutip pada tanggal 9 Januari 2018

⁹⁷ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

Pengadilan Agama Rembang memberikan suatu pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau Pengadilan Agama dalam rangka sederhana cepat biaya ringan yaitu dengan dilaksanakan program sidang keliling perkara. Adapun mengenai pelaksanaan sidang keliling di PA Rembang diselenggarakan di wilayah hukum PA Rembang yang sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah seperti Desa Bencang, Tahunan, Bitingan dan Ngajaran Kecamatan Sale yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang dimana jarak ke empat Desa tersebut kurang lebih 60 KM dari pusat kota Rembang dan masih banyak jalan yang tidak betonisasi atau aspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkawinan, kewarisan, waqaf, perceraian dan lainnya sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum.⁹⁸

Pengadilan Agama Rembang mempertimbangkan lokasi yang paling jauh dan sulit dari akses kendaraan transportasi umum untuk lokasi pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling sudah berjalan empat sampai lima tahun dari Tahun 2012-2017 tetapi pelaksanaan hanya di satu lokasi Kecamatan, rencana baru tahun depan pindah lokasi sidang keliling di kecamatan lain.⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

⁹⁹ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

Pelaksanaan sidang keliling diawali, PA Rembang ijin dengan pak camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat mencari lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat, dikarenakan sidang keliling merupakan program bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat yang kesulitan untuk menjangkau pengadilan agama. Perkara Sidang keliling yang banyak ditangani adalah perkara itsbat nikah hal ini karena kendala yang menghambat peserta sidang keliling perkara itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rembang adalah kendala transportasi karena jarak yang jauh antara Pengadilan Agama Rembang dan Kecamatan Sale yaitu dengan jarak 60 KM dari pusat kota Rembang sehingga untuk menempuh perjalanan ke Pengadilan Agama Rembang dalam rangka mengurus itsbat nikah, membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit serta kendala waktu yang apabila mendaftarkan sidang itsbat nikah pada umumnya membutuhkan waktu yang lama dan sidang juga tidak bisa dilakukan dalam satu kali sidang untuk mendapatkan penetapan pengadilan agama.¹⁰⁰

Menurut hakim Pengadilan Agama Rembang dengan adanya program sidang keliling inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah

¹⁰⁰ Wawancara dengan Lukman Hakim, Panitera Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 18 Januari 2018

dalam mengakses pengadilan agama serta masyarakat juga tidak kesulitan dalam hal biaya untuk menjangkau wilayah Pengadilan Agama Rembang yang relatif jauh dari Kecamatan Sale.¹⁰¹

Sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut mempermudah dan membantu masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat khususnya perkara yang banyak dilakukan sidang keliling yaitu istbat nikah sehingga masyarakat yang sudah menikah mengetahui apa sebenarnya itsbat nikah tersebut dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini membawa dampak maslahat bagi peserta sidang keliling perkara itsbat nikah karena dengan adanya sidang keliling juga sangat membantu peserta sidang keliling yang belum memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan sehingga setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Rembang hak-hak peserta sidang keliling mampu mendapat kepastian hukum.¹⁰² Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 dan

¹⁰¹ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

¹⁰² Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.

Adapun mengenai peserta sidang keliling perkara itsbat nikah tidak mempunyai surat nikah bukan semata-mata adalah kesalahan para peserta atau kesengajaan peserta. Sebagian besar dari peserta sidang keliling tersebut sebelum menikah mengakui telah melengkapi persyaratan administratif dan keuangan melalui modin desa setempat tetapi modinnya tidak meneruskan ke KUA.¹⁰³

Untuk kriteria yang menjadi persyaratan untuk dapat berperkara melalui sidang keliling yaitu apabila para pihak yang berperkara berdomisili atau bertempat tinggal pada wilayah Kecamatan Sale. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling. Sidang keliling dalam satu bulan diadakan sidang sampai 2 kali jika tidak terhalang tanggal libur. Untuk awal pendaftaran perkara sidang keliling (alamat kecamatan Sale) sama seperti pendaftaran perkara lainnya mulai dari mendaftar, membayar biaya panjar di bank, membuat gugatan. Setelah mendapat nomor perkara, kemudian perkara disesuaikan dengan jadwal sidang keliling selanjutnya di Kecamatan Sale. Pengaturan

¹⁰³ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

tempat sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang dari belan Februari 2018 sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Sidang pertama di gedung PKPRI menyewa
2. Sidang selanjutnya di gedung Kecamatan Sale gratis
3. Di tempat rumah warga (honorar Kecamatan Sale) yang sukarela meminjamkan rumahnya untuk digunakan persidangan. PA tetap membayar tapi biaya sewa lebih murah.

Tata ruang persidangan disamakan seperti ruang sidang layaknya di PA. mulai dari letak majelis, saksi, penonton, dan lain-lain walaupun di desain secara sederhana dan seadanya. Pihak Kecamatan Sale banyak membantu dalam proses diadakannya sidang bagi warga. Pihak Kecamatan Sale memfasilitasi dan membantu mengurus ke pengadilan agama karena disesuaikan dengan keluhan masyarakat, seperti mereka mengeluh karena sebelum pernikahan mereka sudah melengkapi syarat administrasi buat dicatatkan pernikahannya, tetapi sampai modinnya meninggal dunia, mereka belum punya surat nikah, mereka kan awam tentang hukum jadi mereka hanya diam saja atau ada warga yang mengeluh sudah pisah dengan suami atau istrinya dan jatuh talak tiga namun belum resmi secara negara. Dengan tidak adanya akta nikah menyebabkan banyak warga tidak bisa mengurus akta kelahiran anak dimana akta kelahiran anak sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan hukum serta syarat untuk mendapatkan hak-hak anaknya. Selain daripada tersebut bahwa dengan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Lukman Hakim, Panitera Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 18 Januari 2018

diterbitkannya buku nikah maka wanita atau istri mendapat perlindungan hukum dan tidak menyulitkan dalam hal pembagian waris.¹⁰⁵

Pencatatan perkawinan menjadi sangat esensial meskipun tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaannya masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.¹⁰⁶

Pengadilan Agama Rembang tidak bisa melakukan pengaturan karena PA Rembang terikat dengan waktu. Sesuai dengan persidangan ketika awal pendaftaran perkara tidak boleh disidangkan lebih satu bulan. Berapapun jumlah perkara yang ada dalam hitungan 30 hari harus disegerakan untuk sidang. Pengadilan Agama Rembang memiliki jadwal sidang keliling dua kali dalam satu bulan. Misalnya warga mengajukan pendaftaran pada tanggal 10 Desember (PA Rembang ada jadwal tanggal 14 dan 28 Desember), maka dalam waktu 4 hari panggilan harus sudah diterima oleh para pihak perkara untuk bisa disidangkan tanggal 14 Desember, tetapi jika tidak bisa maka perkara disidangkan pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 28 Desember

¹⁰⁵ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

¹⁰⁶ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

minggu kedua sidang, minggu keempat sidang diberi jarak 1 minggu untuk libur sidang.¹⁰⁷

Proses pemanggilan para pihak pada sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang dilakukan oleh Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Setelah mendapat perintah dari Majelis hakim, Jurusita pengganti membuat Relaas sesuai nomor perkara. Selanjutnya datang ke rumah pihak sesuai alamat yang telah tertera pada relaas. Jarak pemanggilan minimal 4 hari kerja dengan hari sidang yang telah ditetapkan. Setelah sampai pada alamat, ketika bertemu secara langsung dengan pihak, pihak dimintakan tandatangannya pada relaas. Jika bertemu pihak tetapi tidak mau tandatangan harus ditulis dalam berita dalam relaas panggilan. Ketika tidak bertemu dengan yang bersangkutan jurusita pergi ke Kantor Kepala Desa, sampaikan maksud dan tujuan dan harus ditulis dalam relaas panggilan (tidak bertemu dengan tergugat relaas disampaikan melalui Kepala Desa). Untuk panggilan terhadap Penggugat prosesnya sama dengan tergugat. Panggilan itu patut dan sah sebelum 4 hari kerja harus sudah sampai pada yang bersangkutan. Para pihak yang berperkara dipanggil untuk hadir dalam persidangan yang telah di tentukan berdasarkan “Penetapan” Hari Sidang. Pemanggilan secara patut dilakukan sebelum 4 hari kerja. Pemanggilan dituangkan dalam bentuk

¹⁰⁷ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

relaas panggilan, yang menyuruh para pihak untuk datang dalam persidangan di tempat yang telah ditentukan.¹⁰⁸

Sidang keliling yang dilakukan di PA Rembang terkait juga dengan tugas hakim dalam menjalankan tugas negara, hakim bukan hanya sekedar melakukan persidangan tetapi hakim membawa misi atau tugas untuk sosialisasi bahwa hal yang seperti ini (pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri), perceraian yang tidak tercatat tidak lagi ada di wilayah Kabupaten Rembang. sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan masyarakat pengetahuan terkait adanya Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi hukum islam terkait itsbat nikah dan talk, karena ternyata nikah sirri adalah sebagian termasuk dari budaya masyarakat yang buta akan hukum dan tidak sadar akan hukum, selain itu terjadinya perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan dikarenakan kurang maksimalnya dalam sosialisasi terkait adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan.¹⁰⁹

Di daerah pedalaman Kecamatan Sale tidak sedikit masyarakat lebih percaya dinikahkan oleh seorang kiai dari pada menikah di kantor urusan agama setempat sehingga budaya nikah sirri sudah menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihindari, di Kecamatan Sale ada ribuan pasangan yang melakukan itsbat nikah

¹⁰⁸ Wawancara dengan Abdul Hamid Arif, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 19 Januari 2018

¹⁰⁹ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

bahkan pemerintah daerah menganggarkan sidang itsbat nikah tersebut milyaran rupiah dan pernikahan tersebut mayoritas adalah pernikahan yang dilangsungkan setelah UU No. 1974. Dengan adanya hal tersebut pengadilan agama tidak akan membiarkan begitu saja, hakim dalam memutus perkara harus mengedepankan kearifan lokal yaitu budaya, hakim harus menghormati budaya di masyarakat tersebut sehingga akan tecermin 3 aspek yaitu kemanfaatan, keadilan, kepastian.¹¹⁰

Teknis pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang di mulai dengan Pengadilan Agama Rembang mengajukan anggaran DIPA¹¹¹ dari pusat, jika sudah turun kemudian dibagi untuk berbagai komponen, dari perjalanan dinas, pengaturan tempat, termasuk sidang keliling tersebut. Jika sudah dibagi semua komponen baru bisa direncanakan waktu pelaksanaan sidang keliling dan penunjang pelaksanaan. Pengadilan Agama Rembang mempertimbangkan lokasi yang paling jauh dan sulit dari akses kendaraan transportasi umum untuk lokasi pelaksanaan sidang keliling, kemudian ijin dengan Bapak Camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat

¹¹⁰ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

¹¹¹ DIPA adalah Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran dan disahkan berlaku untuk satu tahun anggaran berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat.¹¹²

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.¹¹³

Pelaksanaan sidang keliling yang harus dilakukan adalah:

1. Pendaftaran perkara sidang keliling

Pendaftaran dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang Secara umum dalam pendaftaran sama, pemohon mendaftar untuk membayar panjar sesuai lokasi tempat tinggal di Pengadilan Agama Rembang, setelah mendaftar diberikan ketentuan sejumlah biaya oleh Pengadilan Agama Rembang untuk dibayarkan oleh pemohon ke bank langsung. Setelah membayar dan mendapatkan bukti pembayaran dari bank, diserahkan kepada petugas di Pengadilan Agama Rembang baru bisa di proses perkaranya dan diberikan nomor perkara

Pada pelaksanaannya prosedur penerimaan perkara pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Rembang menggunakan sistem meja. yakni sebagai berikut:

¹¹² Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

¹¹³ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

- a. Pendaftaran perkara pada dilakukan di Meja I, dimana penerimaan perkara dilakukan oleh Panmud (gugatan permohonan) yang dilaksanakan dengan cara menunjuk petugas pendaftarannya tetap di gedung tempat sidang.
- b. Para pihak datang ke Meja I bagian pendaftaran, sambil membawa surat gugatan/permohonan. Meja I merinci biaya perkara sesuai alamat para pihak (radius yang telah ditentukan). Mengecek persyaratan (surat gugatan/permohonan, KTP, Surat Keterangan dari Desa, surat Akta Nikah yang sudah dilegalisir).
- c. Kasir mengeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dengan slip setoran dibayarkan ke BRI Kecamatan sale. Ada 3 slip setoran (1 untuk pihak, 1 untuk bank, 1 untuk arsip Pengadilan Agama Rembang).
- d. Kemudian Kasir mencatatnya dalam buku jurnal keuangan dan buku Induk.
- e. Setelah itu kasir memberi nomor register perkara bersamaan dengan mengeluarkan SKUM tadi.
- f. Selanjutnya berkas diserahkan ke Meja II untuk dimasukkan ke buku register perkara. Berkas diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Rembang Melalui Panitera Pengadilan untuk menentukan majelis Hakim.
- g. Selanjutnya ke Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menentukan Panitera Pengganti.

h. Selanjutnya Majelis Hakim menentukan hari sidang. Selanjutnya ke Panitera/Sekretaris untuk menunjuk Jurusita pengganti.¹¹⁴

2. Proses pelaksanaan sidang keliling

Pengadilan Agama Rembang menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling adalah pada hari yang telah ditentukan biasanya hari karena pada hari jumat hakim tidak ada sidang. Sehingga tidak ada alasan kurangnya hakim menjadikan kendala untuk melayani masyarakat karena sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat serta membawa dampak manfaat bagi masyarakat. Mengenai sidang keliling perkara itsbat nikah yang diadakan di kantor Kecamatan Sale dilakukan dalam satu kali sidang, khususnya pada kasus istbat nikah sehingga pada hari itu juga peserta sidang keliling langsung mendapatkan penetapan. Proses persidangan tahapan sama yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan permohonan, pembuktian dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka diberikan penetapan.¹¹⁵

Tahapan-tahapan pelaksana sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang adalah:

¹¹⁴ Wawancara dengan Kusriah, Kasir Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 22 Januari 2018

¹¹⁵ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

1. Tahap pemeriksaan sidang keliling

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Dalam pemeriksaan sidang keliling sama dengan sidang pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.¹¹⁶

2. Tahap pembuktian sidang keliling

Pada tahap ini pemohon sidang keliling diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali jika masalah istbat nikah. Diawali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala desa, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas

¹¹⁶ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Sale.¹¹⁷

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majelis mulai memberikan beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila semua bukti telah diungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum.¹¹⁸

3. Tahap kesimpulan

Atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

4. Tahap penetapan

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukannya itsbat nikah atau perkara lain di Pengadilan Agama Rembang. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah atau perkara lain. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon

¹¹⁷ Berkas Berita Acara Persidangan Pentapan dalam sidang keliling Itsbat Nikah.

¹¹⁸ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018 dan observasi pada tanggal 11 – 20 Januari 2018

akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

Perkara tetap diputus di lokasi sidang, disana membaca AMAR putusan saja yang masih berupa konsep. Bentuk fisik putusan tetap diambil di Pengadilan Agama Rembang oleh pihak yang bersangkutan karena bahaya jika keluar Pengadilan Agama Rembang.

Setelah pembacaan putusan oleh ketua majelis dalam bentuk konsep di sidang keliling selanjutnya produk tetap harus diambil oleh yang bersangkutan di Pengadilan Agama Rembang tidak bisa diantar ke lokasi sidang keliling.¹¹⁹

5. Penundaan sidang

Di dalam sidang keliling dalam perkara waris atau perceraian jika semua tahapan belum terpenuhi maka hakim menunda persidangan, sedangkan khusus perkara itsbat nikah yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Rembang di Kantor Kecamatan Sale tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya pada hari tersebut hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada para pihak. Penetapan bisa diambil seminggu setelah dilaksanakan sidang atau setelah pembacaan penetapan Tetapi untuk inkracht atau berkekuatan hukum tetap berlaku 14 hari.¹²⁰

¹¹⁹ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018 dan observasi pada tanggal 11 – 20 Januari 2018

¹²⁰ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018 dan observasi pada tanggal 11 – 20 Januari 2018

Khusus pada sidang perceraian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Apabila pada sidang pertama, pihak lawan (Tergugat/Termohon) tidak hadir maka, sidang ditunda untuk memanggil pihak (Tergugat/ Termohon) sekali lagi.
- b. Apabila pada sidang kedua, pihak lawan (Tergugat/ Termohon) tidak hadir, sedangkan pihak lawan (Tergugat/Termohon) tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketua majelis hakim menanyakan sikap pihak berperkara, apakah gugatan/permohonannya akan tetap dilanjutkan atau dicabut, dan apabila tetap diteruskan maka majelis hakim berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohon.
- c. Apabila perdamaian gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan/permohonan, serta menanyakan kepada penggugat/pemohon apakah ada tambahan atau cukup dalam surat gugatan/permohonannya.
- d. Apabila dalam sidang kedua tersebut pihak berperkara telah menyiapkan alat-alat buktinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian untuk memeriksa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap kesimpulan. Selanjutnya sidang diskors untuk

musyawarah majelis hakim, dan setelah musyawarah majelis hakim selesai. Ketua majelis membacakan putusan dengan tanpa dihadiri pihak lawan (verstek).

- e. Apabila pada sidang kedua pihak lawan (Tergugat/Termohon) hadir, sebelum memeriksa pokok perkara ketua majelis berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi, dengan cara memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara tersebut menghadap mediator.
- f. Apabila pada sidang ketiga, kedua belah pihak berperkara hadir, ketua majelis hakim membacakan hasil mediasi. Apabila proses mediasi berhasil pihak penggugat/pemohon mencabut gugatan/permohonannya. Namun jika gagal, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan/permohonan. Dan apabila pihak lawan sudah siap dengan jawabannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak Tergugat/termohon. Namun apabila pihak lawan belum siap jawabannya maka sidang ditunda.
- g. Apabila pada sidang berikutnya kedua belah pihak berperkara hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap jawab-menjawab (Replik-duplik), pemeriksaan alat bukti (bukti tertulis maupun saksi-saksi), kesimpulan, musyawarah majelis hakim, serta pembacaan putusan.

- h. Apabila pemeriksaan perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), keseluruhan pemeriksaan (pembacaan surat gugatan/permohonan, jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan) dilakukan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, sedangkan pada saat pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.
- i. Apabila pemeriksaan cerai talak, setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) dipanggil untuk sidang pengucapan ikrar talak, terhadap perkara cerai talak yang diikrarkan tersebut ketua majelis hakim menjatuhkan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian.¹²¹

Sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan Agama Rembang menurut masyarakat, sangat diharapkan oleh masyarakat, tahapannya sama seperti sidang hukum perdata, mediasi, jawab-jawab, pembuktian, putusan berlangsung sampai selesai selama kurun program sidang keliling berjalan, sehingga memudahkan para pencari keadilan dari segi jarak tempuh biaya dan waktu.¹²²

¹²¹ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018 dan observasi pada tanggal 11 – 20 Januari 2018

¹²² Wawancara dengan Abdul Ghofur, masyarakat pelaku sidang keliling pada tanggal 22 Januari 2018

Beberapa menyatakan bahwa sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Sale oleh Pengadilan Agama Rembang sangat membantu warga yang ingin mendapatkan kepastian hukum, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lasmi menyatakan masalah akta nikah yang selama ini diinginkannya terwujud setelah ada sidang keliling di Kecamatan Sale,¹²³ begitu juga menurut Bapak Darto yang menyatakan bahwa dirinya telah berpisah dengan istrinya sudah lama, namun belum ada bukti tertulis yang berkekuatan hukum, karena jarak Pengadilan Agama Rembang yang jauh menjadikan proses cerai masih hanya sesuai dengan agama, namun setelah ada sidang keliling menjadikan perceraian sudah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,¹²⁴ hal senada juga dikatakan oleh Ibu Nuriyah Yang menyatakan sidang keliling menjadikannya bisa mengurus akte anak, karena telah mendapatkan buku nikah setelah melakukan istbat nikah pada sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang di Kecamatan Sale.¹²⁵

¹²³ Wawancara dengan Sri Lasmi, masyarakat pelaku sidang keliling pada tanggal 22 Januari 2018

¹²⁴ Wawancara dengan Ahmad Widarto, masyarakat pelaku sidang keliling pada tanggal 22 Januari 2018

¹²⁵ Wawancara dengan Nuriyah, masyarakat pelaku sidang keliling pada tanggal 22 Januari 2018

C. Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang

Proses implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang tidak terlepas dari adanya problematika diantaranya:

1. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Rembang tentunya memakan waktu dan kurang maksimal dalam proses tahapan sidang
2. Dana DIPA yang tidak turun secara tepat waktu, sehingga menghambat pendanaan sidang keliling
3. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang keliling sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat sederhana, sehingga tidak seefektif ketika melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Rembang
4. Tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan
5. Tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu.¹²⁶
6. Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, takut di lihat tetangga.¹²⁷

¹²⁶ Wawancara dengan Qosim, Kepala Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 11 Januari 2018

¹²⁷ Wawancara dengan Abdul Ghofur, masyarakat pelaku sidang keliling pada tanggal 22 Januari 2018

BAB IV
ANALISIS SIDANG KELILING
OLEH PENGADILAN AGAMA REMBANG

A. Analisis Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).¹²⁸

Dalam hal sidang keliling semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat namun demikian bahwasanya tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di tingkat ibu kota dan propinsi.

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Rembang untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju ke kantor PA, yang nantinya juga bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Perkara yang disidangkan

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 3

dalam sidang keliling di PA Rembang adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang PA.

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang sesuai norma hukum yang mengatur sidang keliling adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 yang diatur dalam Bab IV mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Selain itu terdapat beberapa Surat Edaran yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA NO 1 Tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 terbit Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Sale atas sinergi Muslimat merupakan hal yang membawa manfaat besar bagi peserta di Desa Bencang, Tahunan, Bitingan dan Ngajaran Kecamatan Sale yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang upaya untuk mendapatkan penetapan hakim guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Beberapa yang hal yang mengharuskan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Rembang ini dilaksanakan yaitu mengenai akses ke pengadilan, sulitnya akses ke pengadilan karena jarak lokasi yang relatif jauh yaitu 60 KM dari pusat kota Rembang menyebabkan masyarakat sulit menjangkau pengadilan guna mengurus itsbat nikah.

Mengenai lokasi sidang keliling dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014: dijelaskan bahwa “Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain”. PERMA tersebut memberikan penjelasan bahwa sidang keliling bisa dilaksanakan di lokasi yang telah dikoordinasi dengan instansi terkait. Lokasi sulit lebih diutamakan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Adanya sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Rembang memberikan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum karena dengan adanya sidang keliling membantu masyarakat untuk memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan, perceraian yang belum di penuhi sehingga dengan adanya penetapan pengadilan agama hak-hak peserta sidang keliling mendapat kepastian hukum.

Menurut peneliti, pentingnya pencatatan perkawinan, perceraian dan sebagainya dalam rangka memenuhi segala persyaratan administratif karena melihat banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan fotokopi akta kelahiran, dan salah satu syarat

yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran adalah buku nikah orang tua yang bersangkutan.¹²⁹

Ketika hakim telah menemukan fakta hukumnya dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum serta terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka hakim akan memberikan penetapan pada hari itu juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Pasal 4 ayat 2 UU No 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum yang berbunyi: “ peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan adalah biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua dengan tanpa pengorbanan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.¹³⁰ Adapun mengenai masa inkraacht adalah tetap 14 hari setelah penetapan di bacakan oleh hakim.

Implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang terhadap perkawinan sebelum adanya UU No 1 tahun 1974 maupun perkawinan sesudah adanya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelaksanaan

¹²⁹ Henry S Siswosoediro, *Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Jakarta: Visi Media, 2008, h. 146.

¹³⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 69.

sidang keliling itsbat nikah yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Lawang tersebut mayoritas adalah perkawinan sesudah UU No 1 tahun 1974.

Menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 UU No 1 tahun 1989 yang diamandemen dengan undang-undang No 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolute pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku.

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974.¹³¹

Berdasarkan penjelasan beberapa undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa permohonan itsbat nikah yang dapat dimohonkan ke pengadilan agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 sehingga perkawinan yang dilaksanakan setelah undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan agama tidak berwenang untuk mengistbatkannya.

Adapun pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Sale, itsbat nikah adalah

¹³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3.

mayoritas perkawinan setelah Undang-Undang No 1 tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.

Tetapi dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam menetapkan itsbat nikah kontra legem artinya bahwasannya putusan hakim pengadilan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.¹³²

Dalam pertimbangan hakim bahwasannya pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam namun belum tercatat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah.¹³³ Karena berdasarkan alat bukti serta dalil dari peserta

¹³² Suryadi Hs, "Kemungkinan Kontra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama", <http://www.badilag.net/artikel/11971-Kemungkinan-Kontra-Legem-Dalam-Pembagian-Harta-Bersama-Oleh-Drssuryadi-Hsmh-307-.html> "diakses" Senin, 30 Juli 2012 .

¹³³ Safiuddin Kepanjen, Wawancara, 10 Januari 2014.

sidang keliling itsbat nikah tidak menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan menjadi batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili`annya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.¹³⁴

Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".¹³⁵

Dalam penjelasannya ditegaskan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Itu berarti kalau ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim

¹³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 .

¹³⁵ Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut salah satunya dengan adanya sidang keliling itsbat nikah sepanjang hal tersebut di butuhkan dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan itsbatnya bagi perkawinan setelah undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah semata-mata untuk mencapai suatu kemaslahatan serta memberikan pengertian kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi pengadilan tentang betapa pentingnya pencatatan perkawinan.

Menurut hakim selain itu ketentuan yang belum dipenuhi oleh peserta sidang keliling itsbat nikah adalah ketentuan administratif yang terkait dengan adanya pencatatan perkawinan. Karena hal ini terjadi bukan semua kesengajaan dari peserta sidang keliling itsbat nikah, sebagian peserta sidang keliling itsbat nikah sebelum menikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui aparat desa setempat akan tetapi aparat desa tersebut tidak meneruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan peserta tidak tercatat atau tidak mempunyai akta nikah dengan demikian tidak tercatatnya perkawinan bukan sepenuhnya kesengajaan dari peserta sidang keliling, oleh karenanya layak mendapatkan perlindungan hukum oleh hakim dengan memberikan penetapan itsbat nikah.

Tetapi apapun alasanya, yang pasti bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah suatu pelanggaran terhadap undang-

undang perkawinan dikarenakan dengan adanya itsbat nikah yang diperbolehkan untuk perkawinan setelah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 akan menimbulkan banyaknya kawin siri serta pembangkangan terhadap undang-undang.

Selanjutnya secara psikologis dan sosiologis ketika seseorang yang menikah di bawah tangan atau bercerai di bawah tangan dan kemudian dianggap telah melakukan perbuatan tercela oleh masyarakat yang nantinya menjadikan jiwanya terganggu dan merasa malu dengan lingkungan sekitar dan ketentraman dalam hidup berumah tangga tidak terwujud sebagaimana tujuan dari pernikahan menurut Imam Al-Ghozali tentang faedah melangsungkan pernikahan salah satunya adalah Untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga.¹³⁶

Islam cocok dengan kodrat dan fitrah manusia. Adalah jadi naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Untuk hal ini ia ingin mempertahankan keturunannya sendiri dan hak miliknya dan untuk ha ini semua Islam menjamin dan melindunginya.¹³⁷

Selanjutnya secara umum dampak yang diakibatkan oleh adanya tidak adanya pencatatan seperti nikah bawah tangan di

¹³⁶ Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Depag, 1985, h. 61

¹³⁷ A. Ali Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, 2002, h. 76

bawah tangan penulis dapat mengelompokkan menjadi dua dampak, yaitu dampak secara yuridis dan sosiologis, diantaranya:

1. Dampak secara yuridis

Nikah di bawah tangan dianggap tidak sah serta tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, karena tidak sesuai menurut Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang disebabkan tidak adanya bukti otentik berupa akta nikah. Jika dalam keluarga nikah dibawah tangan terdapat perselisihan dan ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut haknya, karena tidak adanya bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melakukan suatu pernikahan, yang dalam hal ini adalah akta nikah.

- a. Jika terdapat anak, maka secara hukum status dari anak tersebut hanya disangkutkan/dikaitkan terhadap ibunya, karena tidak adanya bukti yang menguatkannya.
- b. Jika suami meninggal dunia, istri dan anak-anaknya tidak bisa menuntut hak waris secara hukum (hukum perdata), akan tetapi dalam hukum Islam istri dan anak-anaknya tetap mendapat waris. Apabila yang memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran atau sejenisnya. Karena untuk memperoleh akta kelahiran harus menyertakan akta nikah sebagai bagian dari administrasinya. Istri tidak mendapat tunjangan apabila

suami meninggal, seperti tunjangan asuransi jasa raharja, dsb. Apabila suami sebagai pegawai pemerintahan, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami. Hal yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai bagaimana nasib anak yang tidak menerima warisan akibat dari pernikahan sirri ini. Sebenarnya masih banyak perdebatan bagaimana nasib anak dari pernikahan sirri ini. Jika ditelusuri dalam UUP pasal 42 menyebutkan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan UUP menyebutkan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

- c. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dari KHI pasal 186 yang menyatakan “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri hanya menjadi mawaris dari pihak ibusaja. Jika berdasarkan pasal 863-873 KUH Perdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada akta dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. Untuk anak

luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/ 2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus Faraidz adalah hukum waris Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya akan tetapi tetap anak diluar tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris jika ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP seperti yang dijelaskan diatas . Namun berbanding terbalik jika ini mengacu pada KUH perdata Pasal 285 yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak

- kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mawaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pasal 55 UUP “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang *authentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”
- d. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan suami.

2. Dampak secara sosiologis

Dampak sosiologis dari adanya praktek nikah dibawah tangan yaitu adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa akan mengalami tekanan psikis akibat “label negatif” berupa gunjingan dan pandangan yang tidak bersahabat dari lingkungan sekitar, karena dianggap sebagai istri simpanan atau karena hamil.

Begitu juga dengan anak yang dihasilkan dari praktek nikah bawah tangan dianggap sebagai *anak tidak sah* yang ada dalam masyarakat.

Jadi banyak sekali dampak negatif yang akan diperoleh dari hasil pernikahan bawah tangan khususnya bagi istri dengan model budaya yang masih patriarki yang memposisikan laki-laki adalah raja yang dijunjung setinggi-tingginya, sehingga dapat berbuat sesuai keinginannya.

Pemberian bantuan hukum termasuk Sidang keliling ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bila dilihat dari sudut kemaslahatan, Sidang keliling ini sejalan dengan *magasid asy-syari'ah* (maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam). *Magasid asy-syari'ah* menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama meliputi;¹³⁸ pemeliharaan agama حفظ الدين pemeliharaan jiwa حفظ النفس pemeliharaan akal حفظ العقل pemeliharaan keturunan حفظ النسل dan pemeliharaan harta حفظ المال

Bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.¹³⁹

Senada dengan kaidah tersebut, dengan demikian pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah serta dilaksanakannya sidang keliling perkara itsbat nikah merupakan

¹³⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* sebuah pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 122

¹³⁹ Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Aisa, 1999, h. 290.

tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (masalah mursalah).

Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa masalah mursalah dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Maslahat tersebut harus maslahat yang hakiki (sejati) bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa nash orang banyak.
3. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan nash atau ijma.

Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter seperti yang akan terlebih dahulu digambarkan. Gambaran karakteristik inilah yang kemudian menjadi optik untuk melakukan analisis terhadap praktek penentuan mahar. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam sebenarnya berbeda dari periode ke periode. Tetapi penulis mencoba menggambarkan hal tersebut dalam kategori prinsip-prinsip yang elementer. Bahwa al-Qur'an adalah *primary resources* hukum Islam, maka dalam pembuatan hukum, apa yang

termaktub dalam al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

Pertama, prinsip dasar dari hukum Islam adalah menghapuskan kesulitan. Karena tujuan hukum diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia ('*adam al-haraj*'). Sistem dalam Islam didesain untuk memfasilitasi kebutuhan individu dan masyarakat. Demikian juga, bangunan pilar yang menjadi sandaran Islam adalah untuk menghapus kesulitan umat Islam.

Ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kemasyaqqatan dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah ayat

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya" (al-Baqarah: 286).

Ada juga ayat

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (al-Baqarah: 185).

Dengan prinsip itulah Allah telah membuat hukum yang meringankan seperti bolehnya *membatalkan* puasa dan menggantinya di waktu yang lain, bolehnya mengqashar dan menjama' bagi para musafir. Lebih dari itu, Allah juga

membolehkan mengkonsumsi barang-barang yang haram dan dilarang (daging babi dan alkohol) dalam keadaan-keadaan tertentu (*dharurat*). Dan teladan lain tentang karakter hukum Islam ini juga dapat kita temukan pada pribadi Muhammad. Diceritakan, beliau pernah mengatakan kepada beberapa pengikutnya ketika mendengar kabar tentang pengangkatan Gubernur Yaman. Beliau berkata, يسروا ولا تعسروا (permudahlah persoalan (untuk masyarakat), jangan mempersulit mereka).¹⁴⁰

Kedua, prinsip dasar dari hukum Islam lainnya adalah mengurangi kewajiban-kewajiban agama. Konsekuensi dari dipegangnya prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relatif hanya sedikit. Dengan demikian, tindakan dan hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingkan dengan hal-hal yang diperbolehkan, baik melalui perintah langsung maupun tidak langsung.

Prinsip kemudahan ini jelas dapat dilihat dalam al-Qur'an ketika ia berbicara persoalan yang dilarang dan dibolehkan. Dalam kasus pelarangan, sub-kategori-kategorinya disebutkan dan disertakan, sementara dalam kasus pembolehan, suatu kelonggaran umum diberikan dengan jumlah kategori yang lebih besar.

Syariat Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan

¹⁴⁰ Abu Ameenah Bilal Philips, *Fiqh*, Bandung: Pustaka, 2004, h. 15.

kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam perikatan baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Ketiga, prinsip dasar hukum Islam lainnya adalah merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Ada satu alat analisis yang bisa dijadikan sebagai piranti dalam merealisasikan prinsip dasar hukum Islam ini, yaitu *nasakh*. Nasakh bisa dalam kategori hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian hukum suatu perbuatan.

Jika disederhanakan maka prinsip yang terkandung dalam hukum Islam itu meliputi, menghapuskan kesulitan, mengurangi kewajiban-kewajiban agama, merealisasikan kesejahteraan masyarakat, merealisasikan keadilan universal. Islam memandang suatu kebiasaan dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

Di samping terciptanya keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum menurut peneliti, untuk menjadikan sidang keliling tersebut menjadi suatu program yang bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan harus ada sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan atau perceraian lalu mendaftarkan ke pengadilan agama agar pencatatan perkawinan dan perceraian tidak hanya dipandang sebagai soal administrasi kenegaraan

semata dan tetapi menjadikan kewajiban yuridis, apalagi kewajiban agama. Karena adanya perkawinan siri dan perceraian yang hanya berdasarkan agama tapi dicatatkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari terutama bagi sang istri dan anaknya yang berakibat pasangan sirri ini berduyun-duyun mengajukan permohonan itsbat nikah dan pencatatan perceraian sebagai syarat untuk mendapatkan akta nikah.

Untuk perkara yang dapat disidangkan pada sidang keliling adalah perkara yang mana kedua belah pihaknya berada pada Desa Bencang, Tahunan, Bitingan dan Ngajaran Kecamatan Sale. Karena daerah tersebut dinilai sebagai daerah yang sulit untuk transportasi dan juga merupakan daerah yang jumlah perkaranya banyak. Disini Pengadilan Agama Rembang tidak membedakan apakah pihak-pihak perkara tersebut termasuk kalangan orang yang mampu atau tidak mampu, selama mereka berada di daerah 4 (empat) kecamatan tadi maka perkaranya dapat disidangkan melalui sidang keliling yang diadakan di kantor Kecamatan Sale atau rumah warga.

Mengenai tata ruang sidang keliling yang dilaksanakan di kantor balai desa Kecamatan Sale telah sesuai dengan dokorum ruang persidangan pada persidangan reguler di gedung Pengadilan Agama Rembang . Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010, “ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat Pengadilan”. Ruangan dapat di buka dan di tutup. Dalam ruang

sidang pada sidang keliling di Sale juga terdapat bendera merah-putih dan lambang Pengadilan Agama yang diletakkan di sebelah kanan meja sidang. Dan tertempel pada dinding belakang meja sidang lambang negara Indonesia yakni Garuda Pancasila.

Meja sidang menurut Surat Keputusan Menteri agama Nomor 2 Tahun 1986, tentang pembakuan perlengkapan kerja di lingkungan Departemen Agama, berukuran 150 cm lebar, 300 cm panjang. Menurut Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, dalam Buku Pedoman Kerja Pengadilan Agama 1985, disebutkan 100 cm lebar, 175 cm panjang.¹⁴¹

Mengenai ukuran meja sidang menurut penulis harus diteliti kembali, dan harus ada pembakuan tentang ukuran meja sidang yang benar. Majelis Hakim menggunakan pakaian dan atribut yang telah sesuai. Meja dan tempat duduk Majelis Hakim terletak di depan berhadapan dengan para pihak. Ketua Majelis Hakim berada ditengah-tengah, sebelah kiri dan kanannya anggota majelis hakim, paling kiri adalah panitera sidang.

Hakim Mediator berada di ruangan tersendiri yakni di mushalla dekat ruang sidang keliling. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pasal 12 sebagai berikut: ayat (1) Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim, ayat

¹⁴¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 86.

(2) Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan

Pengadilan Agama Rembang tidak bisa melakukan pengaturan karena PA Rembang terikat dengan waktu. Sesuai dengan persidangan ketika awal pendaftaran perkara tidak boleh disidangkan lebih satu bulan. Berapapun jumlah perkara yang ada dalam hitungan 30 hari harus disegerakan untuk sidang. Proses pemanggilan para pihak pada sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang dilakukan oleh Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Setelah mendapat perintah dari Majelis hakim, Jurusita pengganti membuat Relas sesuai nomor perkara. Selanjutnya datang ke rumah pihak sesuai alamat yang telah tertera pada relaas. Jarak pemanggilan minimal 4 hari kerja dengan hari sidang yang telah ditetapkan.

Jurusita/ Jurusita Pengganti dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan relaas atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang tercantum dalam relaas dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya¹⁴².

¹⁴² Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 103.

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut menurut Pasal 390 juncto Pasal 389 dan 122 HIR dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- d. Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah¹⁴³. Dengan catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan¹⁴⁴.
- e. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati/Wali Kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.

¹⁴³ Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah adalah mereka yang telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu.

¹⁴⁴ Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang, Pasal 103 (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- f. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling di pengadilan Agama Rembang dalam Undang-undang, Pasal 103 (2) UU No. 3 Tahun 2006, yakni sesuai dengan Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:

1. Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
3. Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan
5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.

6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus
8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
9. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.
10. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
11. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim Mediator
12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor 66 Tahun 2005.

Adapun mengenai teknis pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Rembang pada dasarnya teknis pelaksanaan tersebut menggunakan teknis acara yang berlaku secara umum di pengadilan agama, karena secara teknis dan aturan dalam sidang keliling tidak mengatur mengenai tatacara

pelaksanaan sidang keliling. Di dalam SK KMA No 26 tahun 2012 tentang penyelenggaraan peradilan dan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum hanya menjelaskan secara rinci terkait adanya sidang keliling. Menurut ketentuan pasal 54 UU No 7 tahun 1989 bahwasannya hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.¹⁴⁵ Di dalam pelaksanaan sidang keliling dan sidang pada umumnya sebenarnya tidak mempunyai perbedaan, perbedaan hanya terletak pada segi lokasi dimana dalam sidang keliling tersebut lokasi sidang dilaksanakan di tempat yang jauh dari pengadilan agama Rembang untuk memudahkan masyarakat dalam hal biaya dan transportasi.

Tahapan-tahapan pelaksana sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang adalah: tahap pemeriksaan sidang keliling, tahap pembuktian sidang keliling, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang hal ini sesuai Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang mekanisme pendaftaran, pemeriksaan perkara dalam persidangan

Mengenai dekorum ruang sidang, adapun Meja sidang menurut Surat Keputusan Menteri agama Nomor 2 Tahun 1986, tentang pembakuan perlengkapan kerja di lingkungan Departemen Agama, berukuran 150 cm lebar, 300 cm panjang. Menurut

¹⁴⁵ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: IKAPI, 2002, h. 222.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, dalam Buku Pedoman Kerja Pengadilan Agama 1985, disebutkan 100 cm lebar, 175 cm panjang.¹⁴⁶ Sehingga walaupun pelaksanaan sidang tidak dilakukan di pengadilan agama tetapi dekorum pengadilan agama harus tercipta untuk menjaga martabat pengadilan agama. Adapun pengajuan permohonan dalam itsbat nikah menurut pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 121 ayat 4 HIR juga menyatakan bilamana surat gugatan telah selesai disusun atau dibuat maka surat gugatan harus dibubuhi dengan tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya dan harus memenuhi peraturan bea materai kemudian didaftarkan ke panitera pengadilan di wilayah pengadilan yang dituju dengan membayar uang sebagai biaya perkara.¹⁴⁷

Mengenai jalannya acara persidangan ini sama dengan acara yang berlaku pada perkara yang ditangani di pengadilan agama pada umumnya, perbedaannya dalam sidang keliling ini lebih dipercepat proses pemeriksaan dan pembuktian serta penetapan diberikan tanpa adanya penundaan sidang. Ketika hakim telah menemukan fakta hukumnya dan perkawinan tersebut

¹⁴⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 86.

¹⁴⁷ Sophar Maaru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 62.

bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum serta terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka hakim akan memberikan penetapan pada hari itu juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Pasal 4 ayat 2 UU No 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum yang berbunyi: “peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan adalah biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua dengan tanpa pengorbanan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”¹⁴⁸ Adapun mengenai masa inkraacht adalah tetap 14 hari setelah penetapan dibacakan oleh hakim.

Dalam pertimbangan hakim bahwasannya pernikahan dan perceraian yang dilangsungkan menurut agama islam namun belum tercatat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah atau gugat cerai. Karena berdasarkan alat bukti serta dalil dari peserta sidang keliling itsbat nikah tidak menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan menjadi batal apabila:

¹⁴⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 69.

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili`annya.
3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.¹⁴⁹

Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasannya ditegaskan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Itu berarti kalau ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau Penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut salah satunya dengan adanya sidang keliling itsbat nikah sepanjang hal tersebut di butuhkan dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

B. Analisis Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang

Problematika Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang terkait Lokasi tempat sidang yang jauh dan sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah seperti Desa Bencang, Tahunan, Bitingan dan Ngajaran Kecamatan Sale yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang dimana jarak ke empat Desa tersebut kurang lebih 60 KM dari pusat kota Rembang dan masih banyak jalan yang tidak betonisasi atau aspal. Dari tempat Pengadilan Agama Rembang tentunya memakan waktu dan kurang maksimal dalam proses tahapan sidang.

Karena terbatasnya anggaran sehingga Tempat sidang yang sudah disewa yang dilakukan di kantor Kecamatan atau tempat warga untuk pelaksanaan sidang keliling sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat terbatas, sehingga akan berpengaruh pada jalannya proses sidang yang tidak seefektif ketika melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Rembang.

Dalam sidang pembuktian tidak semua saksi yang dibutuhkan dapat hadir dalam persidangan. Masyarakat yang sudah terdaftar pekerjaanya juga tidak semua mengikuti proses sidang keliling dengan tepat waktu. Belum lagi dari masyarakat yang sebagian kecil masih merasa malu untuk menghadiri jika sidang di tempat yang dekat dengan daerah tempat tinggalnya,

alasannya takut jadi bahan gunjingan dikemudian hari karena sudah di lihat tetangga.

Solusi dari Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang adalah perlunya meningkatkan kualitas pelayanan dari Pengadilan Agama Rembang dalam melayani masyarakat, Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum secara adil dan benar. Seperti yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam firmanNya sebagai berikut.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْالُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

Kalau mereka datang kepadamu minta keputusan berilah mereka keputusan, atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, maka sama sekali mereka tidak bisa memberi kemelaratan kepadamu. Kalau kamu memberi hukum kepada mereka berilah hukuman yang adil. Allah suka pada orang-orang yang memberi keputusan dengan adil". (Q. S Al-Maidah: 42).

Pengadilan agama juga perlu lebih meningkatkan intensitas dalam memberikan penyuluhan dan penyadaran yang lebih meluas bagi masyarakat Kecamatan Sale terutama Desa Bencang, Tahunan, Bitingan dan Ngajaran yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Rembang dimana jarak ke empat Desa tersebut kurang lebih 60 KM dari pusat kota Rembang.

Pentingnya bukti tertulis yang syah menurut agama dan negara dalam setiap kegiatan perdata yang dilakukan sehingga

harapan lebih dengan adanya kerelaan dan perasaan senang dari setiap masyarakat Islam untuk mengikuti sidang keliling sebagai upaya melegalkan urusan agamanya. Sidang keliling yang diharapkan mempermudah dan membantu masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat dalam pentingnya bukti fisik legalitas untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini otomatis akan membawa dampak maslahat bagi peserta sidang keliling dalam membantu para pihak berperkara yang belum memenuhi ketentuan administratif. Sehingga setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Rembang hak-hak peserta sidang keliling mampu mendapat kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh PA Rembang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV pasal (14) pada pelaksanaan layanan sidang oleh PA Rembang yang dilaksanakan secara berkala yaitu sebulan dua kali dalam satu tahun yang berlokasi di kantor kecamatan atau rumah warga. Selain itu Surat edaran petunjuk teknis pelaksanaan PERMA NO 1 Tahun 2014 dalam pelaksanaan sidang keliling dilakukan sebagaimana sidang di PA Rembang melalui tahap pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pembayaran, tahap pemeriksaan sidang keliling, tahap pembuktian sidang keliling, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling PN dan PA / Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencatatkan urusan pernikahan maupun perceraianya.

2. Problematika Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang, yaitu :
 - a. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Rembang.
 - b. Dana dwipa yang tidak turun secara tepat waktu, sehingga menghambat pendanaan sidang keliling
 - c. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang keliling sangat sederhana dan fasilitas yang dihadirkan juga sangat sederhana.
 - d. Tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan
 - e. Tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu
 - f. Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, karena malu di lihat tetangga.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang perceraian di bawah tangan, maka sedikit banyak akan mengemukakan hal yang perlu mendapat perhatian:

1. Semua umat Islam hendaknya benar-benar memahami pentingnya pencatatan segala urusan perdata agar sah secara hukum Islam dan agama, sehingga melindungi hak hukum yang dimilikinya.

2. Pengadilan agama Rembang perlu meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat merasa puas dan antusias dengan setiap sidang keliling yang dilakukan.
3. Perlu adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait untuk mensosialisasikan sidang keliling. Sehingga kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut semakin tinggi dan pada gilirannya apa yang menjadi tujuan perundang-undangan di buat tercapai dan berhasil dengan maksimal.
4. Bagi instansi pemerintah untuk mempermudah proses sidang keliling dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan terjun langsung di lapangan.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal Alamin*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Sharon Siddique ed., *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa Rochman Achwan, Jakarta: LP3ES, 1998
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Depag, 1985
- Effendi, Deden, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta: CV. Adi Grafika, 2014
- Fauzan, Achmad, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: IKAPI, 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X, 2010

-----, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Hasan, Ahmadi, *Pendayagunaan Mediasi Syariah Dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, April, 2009

HIR Pasal 125 ayat 2.

HIR Pasal 134, R.Bg Pasal 160 Jo. UU No. 19 Tahun 1964 Pasal 7 Jo. UU No. 13 Tahun 1965 Pasal 1

Hutagalung, Sophar Maaru, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Kadi, S, *Pengadaan Hakim Pengadilan Agama*, Pembimbing, No. 61 Tahun 2012

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Muja'mma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush haf Asysyarif, Medina Al Munawwarah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 .

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* sebuah pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Lubis, Sulaikhan., et. al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Mahkamah Agung R.I, Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 2013

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008

Mukti, A. Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, 2002

Muljono, Wahyu, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Mulyasa, E., *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2007

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996

Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000

Pasal 121 H.I.R. jo. Pasal 93 UU No. 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006

Pasal 157 KUHP. (Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2005

Pasal 17 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004

Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) H.I.R/Pasal 90 ayat (1) UU-PA 38

Pasal 390 joncto Pasal 389 dan 122 HIR.

Pasal 96 UU No. 3 tahun 2006

Pasal 97 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan umum atas UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994

Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.

Philips, Abu Ameenah Bilal, *Fiqh*, Bandung: Pustaka, 2004

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Perss, 2009

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010

-----, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003

Samodera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992

Siswosoediro, Henry S, *Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Jakarta: Visi Media, 2008

Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000

Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, t.th.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Suryadi Hs, “Kemungkinan Kontra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama”,. <http://www.badilag.net/artikel/11971-kemungkinan-Kontra-Legem-Dalam-Pembagian-Harta-Bersama-Oleh-Drssuyadi-Hsmh-307->
- Syafei, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Aisa, 1999
- Syahlani, Hensyah, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 (1 dan 2).
- Undang-undang, Pasal 103 (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang. No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

HAKIM

1. Apa yang menjadi alasan dilakukan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
2. Apa saja wewenang Pengadilan Agama Rembang dalam melakukan sidang keliling?
3. Perkara apa saja yang di sidang dalam sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
4. Bagaimana proses administrasi penyelenggaraan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
5. Bagaimana pengaturan tempat penyelenggaraan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
6. Bagaimana mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling dalam sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
7. Bagaimana perencanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
8. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
9. Bagaimana pengawasan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
10. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan dalam sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?

11. Bagaimana mekanisme pembayaran dalam sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
12. Bagaimana proses putusan dalam sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
13. Bagaimana proses pengambilan hasil putusan dalam sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
14. Bagaimana sistem pelaporan dalam sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
15. Problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?

Masyarakat (pelaku)

1. Apa yang anda ketahui tentang sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
2. Bagaimana pendapat anda tentang sidang yang telah anda lakukan?
3. Bagaimana proses sidang yang anda lakukan dari awal sampai akhir pada sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?
4. Apa manfaat sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang bagi anda?
5. Kendala apa saja yang anda alami dalam melaksanakan sidang?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3391/Un.10.1/D1/TL.01/11/2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

23 November 2017

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Rembang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rizky Mahardhika Giswara
N I M : 132111015
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN
AGAMA REMBANG"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

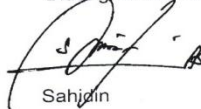
1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Sahjatin

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082331219292) Rizky Mahardhika Giswara

Foto Bersama Panitera Pengadilan Agama



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA REMBANG



KETERANGAN :

- GARIS TANGGUNG JAWAB
- GARIS KOORDINASI

Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling PA Rembang Tahun 2017

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PENGADILAN AGAMA REMBANG BULAN NOVEMBER 2017

LIPA 14

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	2	10	11
1	Januari	-	
2	Pebruari	13	
3	Maret	7	
4	April	18	
5	Mei	18	
6	Juni	20	
7	Juli	16	
8	Agustus	27	
9	September	19	
10	Oktober	11	
11	Nopember	-	
12	Desember		

PENGADILAN AGAMA REMBANG
Hari Jumat, 03-03-2017 -> Ruang : 1

NO	NO PERKARA	NAMA PIHAK	KETERANGAN
1	143/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Penggugat: Fatimatuz Zahro Binti Zaini Tergugat: Abdul Ghofur Bin Darsup	Sidang Lanjutan <i>17-3-17</i>
2	155/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Penggugat: Lulus Wigati binti Saip Tergugat: Edi Subakit bin Ladi	Sidang Lanjutan <i>17-3-17</i>
3	156/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Sasmin bin Kayat Termohon: Sukarsih binti Sardi	Sidang Lanjutan <i>17-3-17</i>
4	177/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Penggugat: Nurhalimah binti Ngarip Tergugat: Adi Suroso bin Amir	SIDANG PERTAMA <i>17-3-2017</i>
5	20/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Haedi bin Kamsi Termohon: Supatminingsih binti Arbadi	Upaya Damai <i>17-3-17</i>
6	23/Pdt.P/2017/PA.Rbg	Pemohon: Suristiyah binti Sampiro	SIDANG PERTAMA <i>17-3-17</i>
JUMLAH			

PENGADILAN AGAMA REMBANG
Hari Jumat, 17-03-2017 -> Ruang : 1

NO	NO PERKARA	NAMA PIHAK	KETERANGAN
1	156/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Sasmin bin Kayat Termohon: Sukarsih binti Sardi	Upaya Damai <i>7-4-2017</i>
2	177/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Penggugat: Nurhalimah binti Ngarip Tergugat: Adi Suroso bin Amir	hadirkan Tergugat <i>7-4-17</i>
3	192/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Abdul Zuber bin Dasmuri Termohon: Sujatmi binti Ngadini	SIDANG PERTAMA <i>5-4-2017</i>
4	20/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Haedi bin Kamsi Termohon: Supatminingsih binti Arbadi	Jawaban Tergugat <i>7-4-17</i>
5	218/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Muhammad Royani bin Saniman Termohon: Khilyatun Nafiah binti Imam Buhaiti	SIDANG PERTAMA <i>7-4-2017</i>
6	230/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Sunardi bin Sadani Termohon: Sutiah binti Lasmin	SIDANG PERTAMA <i>7-4-2017</i>
7	234/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Hendri Puspitasari, S.Pd. binti Suhardi Termohon: Syaifudin Zuhri bin Djaeni	SIDANG PERTAMA <i>7-4-2017</i>
JUMLAH			

PENGADILAN AGAMA REMBANG
 Hari Jumat, 07-04-2017 -> Ruang : 1

NO	NO PERKARA	NAMA PIHAK	KETERANGAN
1	156/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Sasmin bin Kayat Termohon: Sukarsih binti Sardi	Panggil Pemohon <i>TEGUR</i>
2	20/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Haedi bin Kamsi Termohon: Supatminingsih binti Arbadi	Duplik Pemohon <i>21-4-17</i>
3	218/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Muhammad Royani bin Saniman Termohon: Khilyatun Nafiah binti Imam Buhaiti	<i>PERC 21-4-17</i>
4	230/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Sunardi bin Sadani Termohon: Sutiah binti Lasmin	<i>PERC 21-4-17</i>
5	234/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Pemohon: Hendri Puspitasari, S.Pd. binti Suhardi Termohon: Syaifudin Zuhri bin Djaeni	Panggil Tergugat <i>100</i>
6	273/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Penggugat: Ari Fajar Riyanti binti Suradi Tergugat: Abdul Rosid bin Samuri	SIDANG PERTAMA <i>21-4-2017</i>
7	278/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Penggugat: Solihah binti Juli Tergugat: Humaidi bin Daswaji	SIDANG PERTAMA <i>21-4-2017</i>
8	36/Pdt.P/2017/PA.Rbg	Pemohon: 1.Abdul Hakim bin Nursakdi 2.Inayatul Muallimah binti Ahyat	SIDANG PERTAMA <i>100</i>
JUMI AH			

DAFTAR SIDANG HARI SENIN TANGGAL 21 APRIL 2017

- | | |
|---|---|
| - Drs. H.MAHZUMI, MH
- Drs. RAHMAN PAMUJI, M.SI
- Dr. Drs. SUTIYO, MH | HAKIM KETUA
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA |
|---|---|

No	NP	NAMA PIHAK	ALAMAT	KET
1	0020/17	HAEDI BIN KAMSI SUPATMININGSIH BINTI ARBADI	Karas, Sedan Karas, Sedan	Sdg. 5 Duplik
2	0218/17	MUHAMMAD ROYANI BIN SANIMAN KHILYATUN NAFIAH BINTI IMAM BUHAITI	Mojosari, Sedan Karas, Sedan	Sdg. 3 Mediasi
3	0273/17	ARI FAJAR RIYANTI BINTI SURADI ABDUL ROSID BIN SAMURI	Tahunan, Sale Mrayun, Sale	Sdg. 2 Pgl. T
4	0278/17	SOLIHAH BINTI JULI HUMAIDI BIN DASWAJI	Sambong, Sedan Sumurpulpur, Kragan	Sdg. 2 Pgl. T
5	0309/17	KAMSINAH BINTI SUKARI ZAIM BIN SAKIL	Rendeng, Sale Nglojo, Sarang	Sdg. 1
6	0331/17	SARPI BINTI SABAN WARDIYANTO BIN KASMIN	Tahunan, Sale Tahunan, Sale	Sdg. 1
			Panitera Pengganti	

JADWAL SIDANG PENGADILAN AGAMA REMBANG

HARI : JUMAT, 05 MEI 2017

R. SIDANG - 1 [TIM -]

NO	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	KETERANGAN
001	0020/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Haedi Bin Kamsi, Sa Karas Rt.04 Rw. 02 Sedan, Kab. Rembang supatminingsih Binti Arbadi, Sa Karas Rt. 04 Rw.02, Kec. Sedan Kab. Rembang	Pembuktian 19-5-2017
002	0192/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Abdul Zuber Bin Dasmuri, Sa Tanjungan, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Kragan, Kab. Rembang sujatmi Binti Ngadini, Sa Wangi, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur	Pgl. T Saksi 2 19-5-2017
003	0309/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Kamsinah Binti Sukari, Sa Rendeng Rt004 Rw002, Kec. Sale, Kab. Rembang zaim Bin Sakil, Sa Nglojo, Kec. Sarang, Kab. Rembang	Pgl. T Saksi 2 19-5-2017
004	0331/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Sarpi Binti Saban, Tahunan Rt001 Rw010, Kec. Sale, Kab. Rembang wardiyanto Bin Kasmin, Tahunan Rt005 Rw010, Kec. Sale, Kab. Rembang	Pgl. T Saksi 2 19-5-2017
005	0387/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Siti Kalimatus Sa Diyah Binti Mahmudi, Dadapan, Rt. 01 Rw. 03, Kec. Sedan, Kab. Rembang fahrizal Fianika Bin Pudji Santoso, Sa Sedan, Rt 03 Rw 04, Kec. Sedan. Kab. Rembang	Sidang Pertama 19-5-2017
006	0388/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Maslihan Binti Afif, Sidorejo, Rt 03 Rw 02, Kec. Sedan, Kab. Rembang nur Kolis Bin Mustamir, Sidorejo, Rt 03 Rw 02, Kec. Sedan, Kab. Rembang	Sidang Pertama 19-5-12

JADWAL SIDANG PENGADILAN AGAMA REMBANG

HARI : JUMAT, 19 MEI 2017

R. SIDANG - 1 [TIM -]

NO	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	KETERANGAN
001	0020/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Haedi Bin Kamsi, Sa Karas Rt.04 Rw. 02 Sedan, Kab. Rembang supatminingsih Binti Arbadi, Sa Karas Rt. 04 Rw.02, Kec. Sedan Kab. Rembang	Perubahan Dari Terang 19-5-2017
002	0373/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Sri Sutarni Binti Karjani, Sa Bancang Rt005 Rw002, Kec. Sale, Kab. Rembang mukijyar Bin Samuji, Sa Ketodan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur	Sidang Pertama 19-5-2017
003	0387/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Siti Kalimatus Sa Diyah Binti Mahmudi, Dadapan, Rt. 01 Rw. 03, Kec. Sedan, Kab. Rembang fahrizal Fianika Bin Pudji Santoso, Sa Sedan, Rt 03 Rw 04, Kec. Sedan. Kab. Rembang	Pgl. T Saksi 2 19-5-2017
004	0388/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Maslihan Binti Afif, Sidorejo, Rt 03 Rw 02, Kec. Sedan, Kab. Rembang nur Kolis Bin Mustamir, Sidorejo, Rt 03 Rw 02, Kec. Sedan, Kab. Rembang	Pgl. T Saksi 2 19-5-2017
005	0427/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Darwati Binti Suratman, Tahunan Rt001 Rw001, Kec. Sale, Kab. Rembang suis Bin Kliwon, Tahunan Rt001 Rw001, Kec. Sale, Kab. Rembang	Sidang Pertama 2-6-2017
006	0428/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Sidan Bin Sujak, Tahunan Rt001 Rw005, Kec. Sale, Kab. Rembang carni Binti Sadi, Tahunan Rt001 Rw007, Kec. Sale, Kab. Rembang	Sidang Pertama 2-6-2017
007	0043/Pdt.P/2017/PA.Rbg	Muawanah Binti Daimun, Sa Gilis Rt005 Rw002, Kec. Sarang, Kab. Rembang ..., Kec. ..., Kab. Rembang	Perubahan Identitas 19-5-2017

JADWAL SIDANG PENGADILAN AGAMA REMBANG

HARI : FRIDAY, 02 JUNE 2017

R. SIDANG - 1 [TIM -]

NO	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	KETERANGAN
001	0020/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Haedi Bin Kamsi, Sa Karas Rt.04 Rw. 02 Sedan, Kab. Rembang supatminingsih Binti Arbadi, Sa Karas Rt. 04 Rw.02, Kec. Sedan. Kab. Rembang	Musy. Majl Pfr
002	0156/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Sasmin Bin Kayat, Bogorejo Rt.04 Rw.03, Kec. Sedan, Kab. Rembang sukarsih Binti Sardi, Kenongo R.t 02 Rw.01, Kec. Sedan, Kab. Rembang	Dicoret
003	0218/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Muhammad Royani Bin Saniman, Sa Karas, Rt.01 Rw.02, Sedan, Kab. Rembang, Dan Domisili Sekarang Di Duku Pringan, Mojosari, Rt.01 Rw.01, Kec. Sedan, Kab. Rembang khilvatun Nafiah Binti Imam Buhaiti. Sa Karas. Rt.01 Rw.02.	Dicoret
004	0427/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Darwati Binti Suratman, Tahunan Rt001 Rw001, Kec. Sale, Kab. Rembang suis Bin Kliwon, Tahunan Rt001 Rw001, Kec. Sale, Kab. Rembang	Pgl. P Dan T Saksi 2 Bubur.
005	0428/Pdt.G/2017/PA.Rbg	Sidan Bin Sujak, Tahunan Rt001 Rw006, Kec. Sale, Kab. Rembang carni Binti Sadi, Tahunan Rt001 Rw007, Kec. Sale, Kab. Rembang	Pgl. T Saksi 2 Pfr

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rizky Mahardhika Giswara
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 11 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kebalen RT 003 RW 001 Kelurahan Kutoharjo
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
No. HP : 082331219292
Facebook : Mardk
Email : gmardk@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN Kutoharjo VI Rembang : Tahun 2001-2007
2. SMPN 5 Rembang : Tahun 2007-2010
3. MAN 1 Rembang : Tahun 2010-2013
4. SI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang : 2013-Sekarang

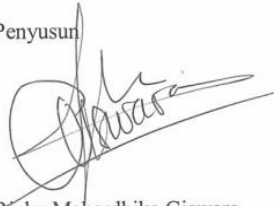
Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Syariah masa juang tahun 2014 - 2015
2. Pengurus UKM Musik Angkatan Grazia tahun 2014 - 2015

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juli 2018

Penyusun



Rizky Mahardhika Giswara

NIM 132111015